

Efektivitas Program SKPP Daring dalam Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Masyarakat di Kota Payakumbuh

Puja Arifti Hanifah¹, Nora Eka Putri²

¹ Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang; ariftipuja@gmail.com

² Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang; noraekaputri@fis.unp.ac.id

* Correspondence: ariftipuja@gmail.com; Jalan Ngurah Rai No.12 Air Tawar Timur, Kota Padang Kode Pos 25132)

Received: 21-10-2022; Accepted: 20-11-2022 ; Published: 21-11-2022

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Payakumbuh, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan program tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas program tersebut. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Campbell, serta teori kendala menurut Hansen dan Mowen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara dengan 9 (sembilan) orang informan, dan studi dokumentasi untuk dokumen dalam penelitian. Uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, *display* data dan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Payakumbuh belum efektif yaitu pada indikator pencapaian tujuan menyeluruh. Adapun kendala internal disebabkan karena jaringan signal, sedangkan kendala eksternal berupa adaptasi penggunaan teknologi dan perbedaan interpretasi peserta terhadap pelaksanaan program, serta kurangnya kesadaran masyarakat awam untuk mengakses informasi terkait program. Agar seluruh tujuan program dapat tercapai, Bawaslu Kota Payakumbuh berupaya untuk menindaklanjuti kader-kader yang telah terbentuk sehingga tujuan pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan dapat tercapai.

Kata Kunci: Efektivitas; Pengawasan Partisipatif; SKPP Daring

Abstract: This research aims to determine the effectiveness of the Online Participatory Supervision Cadre School Program (SKPP Daring) in improving community participatory supervision in Payakumbuh City, and identifying the constraints in the program. In addition, this study also aims to identify the efforts to improving the effectiveness of program. This research uses the theory of effectiveness according to Campbell, and theory of constraints according to Hansen and Mowen. This research uses descriptive qualitative method and informants are selected using purposive sampling technique. In collecting data, used interview techniques with 9 (nine) informants, and study documentation for documents in research. The validity of the data was tested using the triangulation method, while the data analysis technique are performed by reducing the data, displaying the data and drawing conclusions from the research that has been carried out. The results of this study indicate that the Online Participatory Supervision Cadre School Program (SKPP Daring) in increasing community participation in Payakumbuh City has not been effective on the indicator of achieving of overall goals. Internal constraints are caused by network signals. And external constraints in the form of adaptation of technology usage and differences in participants interpretation of program implementation, as well as the lack of awareness of the public community to access information related to the program. So that all goals can be achieved, Bawaslu Payakumbuh seeks to encourage cadres that have been formed so the purpose of establishing an education center for elections and local elections that can be achieved.

Keywords: Effectiveness; Participatory Supervision; SKPP Daring

1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ciri paling mendasar dari negara demokrasi dalam pergantian pemimpin negara secara sah. Melalui pemilu dan pilkada masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang menurutnya dapat menjadi wakil yang akan menyuarakan kepentingan rakyat untuk lima tahun kedepan. Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas harus diikuti dengan partisipasi dan pengawasan yang optimal yang mampu meminimalisir terjadinya kecurangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu; menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran; melakukan penanganan dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang; serta melakukan penanganan dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Keterbatasan yang dimiliki Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh di tiap tahapan pemilu dan pilkada harus diatasi dengan melibatkan berbagai kepentingan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif memberi ruang dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk memastikan pemilu dapat terselenggara sesuai dengan prinsip luberjurdil dan demokratis, serta dapat menegakkan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu (Bawaslu, 2020a: 129). Secara kuantitas Bawaslu telah mampu meningkatkan jumlah relawan pengawas partisipatif, tetapi dari segi kualitas *output* yang dihasilkan melalui angka pemantauan pemilu yang dilakukan masyarakat masih cukup rendah. Pada pemilu 2019 Bawaslu menyebut terdapat 24.528 dugaan pelanggaran pemilu yang mana 79 persen (19.436 dugaan pelanggaran) ditemukan oleh Bawaslu dan 21 persen (5.092 dugaan pelanggaran) berasal dari laporan masyarakat. Pada pilkada serentak 2020 terdapat 1.542 laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bawaslu dari total 3.686 temuan dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan Bawaslu (Bawaslu, 2020a: 129). Angka tersebut menggambarkan bahwa laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran lebih sedikit dibandingkan temuan Bawaslu, yang menandakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pilkada masih rendah.

Selain permasalahan tingkat pengawasan partisipatif di atas, dari data Bawaslu, pilpres 2019 diwarnai dengan berbagai pelanggaran. Khusus di Kota Payakumbuh, berdasarkan Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tahun 2019, terdapat 9 (sembilan) laporan dugaan pelanggaran. Dari laporan tersebut 3 (tiga) diantaranya tidak dilanjutkan untuk diregistrasi, 3 (tiga) laporan/temuan bukan merupakan

pelanggaran pemilu yaitu laporan 001/LP/PL/KOTA/03.05/VIII/2018, 001/LP/PL/KOTA/03.05/I/2019, & 002/LP/PL/KOTA/03.05/IV/2019, dan 3 (tiga) laporan/temuan yang tersisa diantaranya pelanggaran netralitas ASN dengan nomor 001/TM/PP/KOTA/03.05/III/2019 dan pelanggaran tersebut direkomendasikan pada KASN melalui Bawaslu Provinsi Sumbar; laporan dengan nomor registrasi 003/LP/PL/KOTA/03.05/V/2019 yang diproses ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, serta laporan/temuan dengan nomor 001/ADM/BWSL-PROV.SB.03.05/PEMILU/V/2019 yang terbukti melakukan pelanggaran administratif sehingga diberikan teguran tertulis kepada pelanggar. Pada pilkada serentak 2020, di Kota Payakumbuh terdapat 5 (lima) laporan dan temuan yang telah diregister berdasarkan Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bawaslu Kota Payakumbuh Tahun 2020, diantaranya laporan 01/LP/PG/Kota/03.05/III/2020, dan 02/LP/PG/Kota/03.05/III/2020, temuan dengan nomor 01/TM/PG/Kota/03.05/IX/2020, 02/TM/PG/Kota/03.05/XI/2020, dan terakhir 01/Reg/PL/PG/Kec-BRT/03.05/XII/2020. Tiga dari laporan/temuan tersebut bukan termasuk pelanggaran, sedangkan dua diantaranya adalah pelanggaran administrasi yaitu laporan 01/LP/PG/Kota/03.05/III/2020 dan 01/TM/PG/Kota/03.05/IX/2020 (Bawaslu Kota Payakumbuh, 2021: 175-178).

Selain data pelanggaran di atas, partisipasi dalam penggunaan hak pilih masyarakat di Kota Payakumbuh juga termasuk pada taraf yang rendah seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 Partisipasi Hak Pilih Masyarakat Kota Payakumbuh

Tahun	Persentase Pemilih	Jumlah Pemilih
2015	45.107 suara (51,83%)	87.035 orang
2017	57.743 suara (68,3%)	84.503 orang
2020	48.388 suara (51,2%)	94.347 orang

Sumber: Ferdian dkk (2021: 172) dan KPU Kota Payakumbuh (2020: 7)

Dari persoalan diatas dapat kita ketahui bahwa partisipasi masyarakat baik dari segi pengawasan maupun penggunaan hak pilih dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Menurut Murafer (dalam Ferdian dkk., 2021: 172) permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan cara memperluas area pengawasan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan dalam pemilu sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pemilu. Dalam rangka memperluas area pengawasan serta memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pengawasan, Bawaslu membentuk program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Sekolah Kader Pengawas

Partisipatif (SKPP) merupakan gerakan bersama untuk memperluas dan memperdalam pemahaman terkait politik, pemilu, dan pengawasan masyarakat agar masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan pemilu atau pilkada (Bawaslu, 2020b: 2).

Pelaksanaan program SKPP merupakan amanat pasal 448 ayat (2) dan (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta merupakan proyek prioritas Bawaslu dalam RPJMN 2020-2024. Pelaksanaan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) mengalami penyesuaian seiring berjalannya waktu. Tahun 2020, program SKPP dilaksanakan secara daring di 34 provinsi di Indonesia sebagai inisiasi dari Bawaslu terhadap kondisi pandemi Covid-19. Secara teknis, pelaksanaan SKPP Daring diatur dalam SE No 0261/K.Bawaslu/PM.01.00/IV/2020 yang menjelaskan persiapan; sosialisasi; proses pembelajaran yang terdiri dari sesi audio visual, diskusi daring, dan ujian daring; hingga pelaksanaan ujian daring, serta tugas dan tanggung jawab Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan catatan Bawaslu pelaksanaan SKPP Daring ini dimulai pada 9 April 2020. Dari Kota Payakumbuh terdapat 29 orang peserta yang dapat mengikuti program SKPP Daring. Adapun untuk jumlah peserta yang mengikuti program SKPP Daring secara keseluruhan dari pendaftaran hingga kelulusan dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Jumlah Peserta Program SKPP Daring

Tahapan	Jumlah Peserta	
	Nasional	Sumatera Barat
Pendaftaran	20.665 orang	1.513 orang
Proses Seleksi	20.055 orang	1.207 orang
Lulus Program	12.703 orang	502 orang

Sumber: Bawaslu (2020a: 134)

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan antara lain oleh Millah & Dewi (2021) yang membahas mengenai program SKPP sebagai sarana pendidikan politik. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan berbagai permasalahan pelanggaran, kerawanan, serta partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia yang selalu menurun, serta bagaimana program SKPP Bawaslu dalam memberikan kesadaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu agar melahirkan pemilu yang demokratis. Penelitian lainnya dilakukan oleh Saufi dkk (2020) tentang SKPP Daring sebagai sarana pendidikan pemilu dan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian tersebut membahas perubahan yang terjadi pada bentuk pelatihan pengawasan yang biasanya tatap muka menjadi virtual sebab pandemi covid-19. Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan program SKPP dilaksanakan

selama 3 bulan mulai dari pendaftaran hingga ujian akhir menggunakan metode *e-learning* dan penggunaan audio visual, media sosial dan *metting room*. Penelitian tersebut juga membahas faktor-faktor yang menghambat proses pembelajaran.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ferdian & Khaidir (2021) tentang “*Bawaslu's Transformation in Generating Supervision Cadres*”. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana implementasi SKPP Daring sebagai transformasi Bawaslu dalam menghasilkan kader pengawas yang terdiri dari Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Kelas I, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Kelas II, dan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Online. Penelitian tersebut menjelaskan perbedaan pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dari segi jumlah peserta, cakupan wilayah, serta perubahan sosial yang berkaitan dengan adopsi teknologi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, pembahasan terkait program SKPP difokuskan pada fungsi dan tujuan program SKPP sebagai sarana pendidikan serta bagaimana implementasinya dari waktu ke waktu. Sedangkan pada penelitian ini, pembahasan akan mengarah pada bagaimana efektivitas pelaksanaan program SKPP Daring di Kota Payakumbuh dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, serta menggali berbagai kendala yang dihadapi saat pelaksanaan program dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pelaksanaan program tersebut. Selain itu, mengingat pentingnya pengawasan partisipatif sebagai bentuk pencegahan pelanggaran pemilu dan pilkada di Kota Payakumbuh, maka pada penelitian ini akan dibahas efektivitas program SKPP Daring dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Payakumbuh.

2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan metode ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu permasalahan dengan terstruktur, faktual, dan akurat melalui pengamatan dilapangan sehingga dapat dipahami secara mendalam. Pembahasan pada penelitian ini akan difokuskan dengan membahas bagaimana efektivitas program SKPP Daring dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat di Kota Payakumbuh.

Penelitian dilakukan di Bawaslu Kota Payakumbuh dan menyebar di beberapa kecamatan di Kota Payakumbuh. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan dengan pertimbangan bahwa informan dapat memberikan data dengan maksimal. Informan pada penelitian ini terdiri dari 9

(sembilan) orang yaitu Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh yang memiliki kebijakan tentang program SKPP Daring dalam hal ini Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh sebagai pelaksana yang memahami teknis pelaksanaan program, peserta SKPP Daring yang mengikuti dan memperoleh manfaat program, serta beberapa masyarakat umum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bersama informan dengan menggunakan pedoman wawancara serta melakukan studi dokumentasi dengan mempelajari dokumen, bahan tertulis serta bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Cara ini dilakukan agar memperoleh informasi yang mendalam dan dapat mempertegas data yang telah diperoleh sebelumnya. Data bersumber dari data primer yaitu data yang diperoleh tanpa perantara seperti hasil wawancara dengan informan, dan data skunder yang dikumpulkan dari studi dokumentasi maupun riset terdahulu yang relevan.

Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber daya yang ada. Teknik triangulasi sumber digunakan pada penelitian ini untuk membandingkan dan melakukan pengecekan derajat kepercayaan dari sumber data yang berbeda. Untuk teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, *display* data, serta penarikan kesimpulan dari penelitian tersebut. Reduksi data merupakan proses mengurangi, merangkum, dan memilih data sehingga akan memberi pola dan gambaran yang jelas. Setelah itu data di-*display* dan ditarik kesimpulan dan diverifikasi secara terus menerus sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Efektivitas Program SKPP Daring di Kota Payakumbuh

Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Dalam Jaringan (SKPP Daring) di Kota Payakumbuh dapat diukur menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24) yaitu : keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input* dan *output*, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

1) Keberhasilan Program

Menurut Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 26) suatu program dikatakan berhasil apabila program sudah berjalan optimal baik secara kualitas, proses, mekanisme maupun hasil berupa tercapainya tujuan kegiatan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Program SKPP Daring di Kota Payakumbuh telah

dijalankan dengan optimal. Dari perspektif proses, program SKPP Daring telah dijalankan maksimal terutama berdasarkan *timeline* dan teknis yang diberikan Bawaslu RI yang dimulai dari proses sosialisasi menggunakan seluruh media sosial Bawaslu, proses pendaftaran peserta, seleksi peserta, serta membentuk grup komunikasi antara peserta dan penyelenggara.

Dari perspektif hasil, program ini berhasil membentuk kader pengawas dan yang berperan dalam meluaskan ilmu pengawasan. Peran tersebut dapat berupa turun sebagai pengawas saat pemilu atau pilkada ataupun sebagai penggerak di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga integritas pemilu. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa program SKPP Daring di Kota Payakumbuh telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya dengan efektif indikator keberhasilan program baik perspektif proses maupun hasil.

2) Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran menurut Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24) dapat dilihat dari *output* yang dihasilkan program. Berdasarkan temuan penelitian, program SKPP Daring di Kota Payakumbuh telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu terlibatnya masyarakat khususnya kaum millennial untuk ikut serta dalam proses transfer ilmu pengetahuan terkait pengawasan pemilu dan pilkada. Masyarakat yang terlibat pada program ini akan menjadi kader pengawas, dan akan menjadi perpanjangan tangan dari Bawaslu Kota Payakumbuh dalam melakukan pengawasan.

Peserta yang dapat mengikuti program telah melalui tahapan penjarangan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan sebelumnya sehingga kader-kader pengawas yang tercipta nantinya benar-benar akan berperan ketika berada di masyarakat. Kader-kader pengawas di seleksi dengan standar yang ditentukan Bawaslu RI; dibekali materi terkait pengawasan, demokrasi, pemilu dan pilkada; serta di uji melalui ujian daring sehingga peserta yang melewati ambang batas penilaian untuk memperoleh sertifikat kelulusan. Pelaksanaan program SKPP Daring di Kota Payakumbuh sangat membantu peserta program dalam memperoleh pengetahuan terkait pengawasan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh kepada masyarakat.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24) tentang indikator keberhasilan sasaran dan berdasarkan hasil

temuan peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa indikator keberhasilan sasaran telah tercapai. Hal ini dibuktikan dengan telah dipenuhinya syarat dan kriteria bagi peserta program untuk mengikuti proses pembelajaran, serta telah dilakukannya penilaian yang objektif dari tim penilai sehingga yang lulus program benar-benar telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan telah dipenuhinya standar tersebut maka sasaran program yaitu peningkatan pengetahuan pengawasan pengawasan partisipatif masyarakat melalui kader-kader yang dibentuk telah tercapai.

3) Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan terhadap program menurut Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24) dapat dilihat dengan mengukur bagaimana program dapat memenuhi kebutuhan penerima program baik dari segi produk maupun jasa. Jika program tersebut dapat memberikan produk atau jasa yang bermanfaat maka tingkat kepuasan penerima manfaat program akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepuasan terhadap program SKPP sudah tercapai yang kepuasan peserta program terhadap pelaksanaan program terutama dari segi materi yang disampaikan. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan terkait peningkatan pengetahuan pengawasan juga telah terpenuhi. Minat masyarakat terhadap program SKPP Daring di Kota Payakumbuh juga tinggi. Hal ini dibuktikan dengan permintaan masyarakat agar program dilaksanakan secara kontinu sehingga dapat memperluas wawasan masyarakat tentang pengawasan dan pemilu. Sehingga program ini memang perlu untuk diselenggarakan berkesinambungan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24) tentang indikator kepuasan terhadap program dan hasil temuan peneliti di lapangan melalui proses wawancara dapat diketahui bahwa kepuasan terhadap program SKPP sudah efektif karena peserta program merasakan kemudahan dalam mengikuti program tersebut, serta peserta memperoleh manfaat dari pelaksanaan program tersebut.

4) **Tingkat *Input* dan *Output***

Menurut Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24) perbandingan antara *input* yang diberikan dan *output* yang diterima merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program. Jika *output* yang diterima lebih besar dibandingkan *input* yang diberikan maka dapat dikategorikan bahwa program efektif dijalankan. Dan juga sebaliknya jika *output* lebih kecil dibandingkan *input* maka aktivitas atau program tersebut dapat dikatakan belum efektif.

Berdasarkan temuan penelitian, indikator tingkat *input* dan *output* dari program SKPP Daring di Kota Payakumbuh telah efektif dijalankan. Hal ini ditunjukkan dari dukungan yang optimal yang diberikan Bawaslu Kota Payakumbuh kepada peserta program dari awal pelaksanaan hingga dukungan saat terjun ke masyarakat. Dukungan tersebut berupa kompensasi kuota internet, ketersediaan kantor dan perangkat elektronik jika dibutuhkan peserta, adanya fasilitas berupa program seperti pojok pengawasan dan forum warga, serta support khusus seperti akomodasi dan biaya lainnya bagi peserta yang lanjut ke tingkat nasional. Dukungan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengikuti program sehingga peserta benar-benar maksimal dalam mengikuti program, serta lebih optimal dalam merealisasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari sebelumnya.

Output yang diterima dengan diselenggarakannya program SKPP Daring di Kota Payakumbuh adalah dengan diaplikasikannya ilmu pengawasan yang telah diperoleh peserta SKPP Daring kepada masyarakat yang dimulai dari lingkungan terkecilnya. Peserta SKPP Daring berperan dalam menyebarkan pengetahuan terkait pengawasan pemilu dan pilkada baik dilingkungan keluarga, teman, maupun turun ke masyarakat dan berperan sebagai pengawas pemilu atau pilkada. *Output* ini mendukung pencapaian tujuan dari program itu sendiri yaitu meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat melalui peran kader-kader pengawas. Peran mereka dilingkungan terkecil seperti keluarga, kerabat, hingga ke masyarakat secara luas tentu akan dapat meningkatkan pengawasan pemilu.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24) tentang indikator tingkat *input* dan *output* program dan berdasarkan temuan penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa tingkat *input* dan

output program SKPP Daring di Kota Payakumbuh sudah efektif. Dukungan yang diberikan Bawaslu Kota Payakumbuh kepada peserta program sangat membantu peserta agar maksimal dalam mengikuti proses pembelajaran. Sehingga kader-kader pengawas yang tercipta juga akan maksimal dalam memahami materi tersebut. Peran mereka di masyarakat juga menjadi pencapaian bagi Bawaslu Kota Payakumbuh dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dalam masyarakat.

5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Menurut Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24) pencapaian tujuan menyeluruh merupakan indikator untuk mengetahui bagaimana pencapaian organisasi dan bagaimana organisasi tersebut menjalankan tugasnya. Kebijakan suatu program dapat dikatakan berhasil jika telah mencapai tujuan secara menyeluruh termasuk bagaimana organisasi menjalankan tugasnya berdasarkan kemampuan operasional.

Program SKPP Daring di Kota Payakumbuh memiliki tujuan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, menjadi sarana pendidikan pemilu dan pilkada bagi masyarakat, membentuk pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan, serta menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawasan partisipatif. Berdasarkan temuan penelitian, pencapaian tujuan dari program SKPP Daring di Kota Payakumbuh belum optimal secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tujuan program yang belum tercapai.

Tiga dari empat tujuan program SKPP Daring di Kota Payakumbuh tercapai yaitu tujuan peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat, sarana pendidikan pemilu dan pilkada bagi masyarakat, serta menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawasan partisipatif. Hal ini tergambar dari pelibatan masyarakat dalam pendidikan pengawasan pemilu, kemudian terbentuknya kader-kader penggerak pengawasan partisipatif, sehingga kehadiran kader tersebut dapat meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.

Tujuan yang belum tercapai dengan efektif yaitu pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan pada program SKPP Daring di Kota Payakumbuh. Hal ini dibuktikan dengan belum maksimalnya pemanfaatan ruang diskusi yang intensif bagi para kader-kader pengawas yang telah terbentuk. Ruang diskusi seperti Pojok Pengawasan serta Forum Warga

belum secara maksimal dimanfaatkan oleh kader-kader pengawas dan juga masyarakat dalam berbagi ide dan pendapat untuk melakukan sebuah pergerakan bersama.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24) tentang indikator pencapaian tujuan menyeluruh dan berdasarkan temuan penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa indikator pencapaian tujuan menyeluruh belum efektif dilaksanakan.

B. Kendala Pelaksanaan Program SKPP Daring di Kota Payakumbuh

Dalam pelaksanaannya Terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program SKPP Daring di Kota Payakumbuh. Menurut Cox & Schleier (dalam Larasati & Haksama, 2016: 157) salah satu teori yang dapat digunakan untuk mengetahui kendala ataupun faktor yang mempengaruhi suatu proses adalah *Theory of Constraints (TOC)*. Hansen dan Mowen (dalam Larasati & Haksama, 2016: 157) membagi *constraint* berdasarkan asalnya menjadi dua kelompok yaitu:

1) Kendala Internal

Kendala internal merupakan permasalahan yang timbul didalam organisasi, dapat berupa sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, anggaran, ataupun permasalahan lainnya dan harus dikelola dengan maksimal agar dapat meningkatkan *output*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendala internal yang menghambat pelaksanaan program SKPP Daring adalah gangguan jaringan saat mengikuti proses pembelajaran. Terhadap kendala tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh telah mengantisipasi dengan mengizinkan peserta program hadir di kantor Bawaslu untuk memanfaatkan PC dan jaringan wifi. Sehingga kendala tersebut tidak membatasi proses pembelajaran peserta SKPP Daring dan *output* program pun dapat dicapai dengan maksimal.

2) Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan permasalahan yang terjadi yang bersumber dari luar organisasi yang harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik agar tidak mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, kendala eksternal pada pelaksanaan program SKPP Daring di Kota Payakumbuh berupa adaptasi dan penyesuaian dari peserta terhadap penggunaan teknologi karena program dilaksanakan secara *virtual* berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang diadakan secara tatap muka. Dari yang biasanya bisa berdiskusi

langsung dan *FGD* pada metode daring tentu akan menemukan banyak rintangan seperti jaringan, *platform* belajar, dan sebagainya. Banyak peserta yang pada saat itu masih belum optimal dalam menggunakan aplikasi *virtual meeting* sehingga keikutsertaan dalam program pun akan terganggu.

Selain kendala diatas, kendala lainnya yang terjadi adalah kekeliruan peserta dalam menginterpretasikan tujuan program tersebut. Program ini diadakan dan disiarkan agar masyarakat yang mengikuti program dapat meningkatkan pengetahuannya terkait pengawasan pemilu dan pilkada sehingga mereka dapat melakukan pengawasan secara mandiri dan mawas diri terhadap segala bentuk kecurangan pemilu. Peserta program yang salah dalam memaknai tujuan program akan mengira bahwa setelah program tersebut selesai, mereka akan di rekrut menjadi bagian di Bawaslu ataupun Pengawas di lingkungan sekitarnya.

Kendala eksternal lainnya yang terjadi pada pelaksanaan program SKPP Daring di Kota Payakumbuh adalah kurangnya kesadaran masyarakat umum untuk aktif dalam mencari informasi terkait kegiatan pengawasan pemilu atau pilkada ataupun kegiatan yang berasal dari instansi pemerintahan lainnya melalui media sosial. Informasi terkait program SKPP Daring lebih banyak diakses oleh orang-orang yang memang telah memiliki kesadaran terhadap program yang diselenggarakan Bawaslu ataupun instansi yang terkait. Sedangkan masyarakat awam masih terpaku pada cara konvensional dalam sosialisasi yaitu pendekatan secara langsung. Walaupun di era ini masyarakat awam sudah melek dengan teknologi, tetapi penggunaan media sosial hanya sebagai media hiburan saja.

C. Upaya Meningkatkan Efektivitas Program SKPP Daring di Kota Payakumbuh

Dalam meningkatkan efektivitas program SKPP Daring di Kota Payakumbuh, kendala yang menghambat pencapaian tujuan program perlu untuk diatasi dan dikelola dengan maksimal agar tujuan-tujuan dari program tersebut tercapai secara keseluruhan. Berdasarkan temuan penelitian, upaya yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan efektivitas program SKPP Daring di Kota Payakumbuh adalah dengan melakukan *follow up* terhadap kader-kader penggerak pengawasan partisipatif yang telah terbentuk. Bawaslu Kota Payakumbuh perlu menindaklanjuti kader-kader yang telah terbentuk agar mereka dapat terintegrasi sehingga dapat dengan mudah merumuskan ide visioner untuk kegiatan pengawasan yang akan dilakukan kedepannya.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan program SKPP Daring di Kota Payakumbuh dapat dikatakan efektif yaitu pada indikator keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, serta tingkat *input* dan *output*. Dari lima indikator pengukuran efektivitas yang dikemukakan Campbell (dalam Utami & Frinaldi, 2021: 24), satu indikator pengukuran efektivitas pada program SKPP Daring di Kota Payakumbuh masih kurang efektif yaitu indikator pencapaian tujuan menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan belum maksimalnya pemanfaatan ruang diskusi yang intensif bagi kader-kader penggerak pengawasan partisipatif sehingga tujuan pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan pada program SKPP Daring di Kota Payakumbuh belum dicapai secara efektif.

Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program SKPP Daring di Kota Payakumbuh diantaranya kendala internal yaitu adanya gangguan jaringan saat mengikuti proses pembelajaran yang dapat mengganggu proses pembelajaran; serta kendala eksternal berupa adaptasi dan penyesuaian peserta untuk mengikuti program karena pelaksanaan secara daring; adanya perbedaan penafsiran pada *output* program SKPP Daring yang akan mempengaruhi tujuan pelaksanaan program serta motivasi peserta dalam menyelesaikan proses pembelajaran, serta minimnya kesadaran masyarakat awam untuk mengakses informasi terkait program-program pemerintah khususnya terkait pengawasan pemilu dan pilkada melalui media social.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala serta meningkatkan efektivitas program SKPP Daring di Kota Payakumbuh adalah dengan melakukan *follow up* terhadap kader-kader penggerak pengawasan partisipatif yang telah terbentuk agar keanggotaannya dapat terintegrasi, sehingga untuk output jangka panjang sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Kota Payakumbuh dapat tercapai.

5. Daftar Pustaka

- Bawaslu. (2020a). *Catatan Pengawasan Pemilihan 2020*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bawaslu. (2020b). *Panduan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Dalam Jaringan*. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bawaslu Kota Payakumbuh. (2021). *Pengawasan Komprehensif di Kota Biru*. Payakumbuh: Badan Pengawas Pemilu Kota Payakumbuh

- Ferdian, M., Firman, F., & Rusdinal, R. (2021). Pertukaran Sosial Dalam Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 171–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i1.414>
- Ferdian, M., & Khaidir, A. (2021). Bawaslu's Transformation In Generating Supervision Cadres. *Science and Environmental Journals for Postgraduate*, 3(2), 70–79. <http://senjop.ppj.unp.ac.id/index.php/senjop/>
- KPU Kota Payakumbuh. (2020). *Buku Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020*. Payakumbuh: KPU Kpta Payakumbuh. www.kpu-payakumbuhkota.go.id
- Larasati, S. P., & Haksama, S. (2016). Penerapan Theory of Constraint pada Kepuasan Kerja Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 4(2), 155–162.
- Millah, N. S., & Dewi, D. A. (2021). SKPP Bawaslu Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 355–363.
- Saufi, A., Faiz, A., & Yanuar, M. R. (2020). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu dan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(3), 486–500. <https://doi.org/10.31764/jces.v3i1.2400>
- Utami, E. P., & Frinaldi, A. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sicantik di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 22–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.215>



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).